

PENYULUHAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN

BUDAN PENYULUHAN, LATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN



DEPARTEMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA TIMUR
1987/1988

MAKULUYEN
HABITAT

MAKULUYEN
HABITAT

MAKULUYEN
HABITAT

PENYULUHAN PERTANIAN



DEPARTEMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA TIMUR
1987/1988

PENYULUHAN
PERTANIAN

DEPARTEMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI PERTANIAN
KUSA TENGGARA TIMUR
1987/1988



KATA PENGANTAR

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan pertanian dewasa ini adalah peran serta petani nelayan beserta keluarganya. Peran serta petani nelayan dapat ditingkatkan melalui penyuluhan sehingga kegiatan dapat diarahkan untuk meningkatkan produksi usaha tani sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Oleh karena penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan kerja sama antar pemerintah dan petani nelayan maka perlu adanya pedoman bagi pelaksana penyuluhan yang dituang dalam bentuk Program penyuluhan pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dalam brosur ini kami muat pedoman cara penyusunan program penyuluhan pertanian baik tingkat WKBP, Kabupaten maupun Propinsi.

Semoga Brosur ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, Januari 1988.

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENGERTIAN	5
II. NAMA, ISI DAN SISTIMATIKA PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5
1. Nama Program Penyuluhan Pertanian	5
2. Isi Program Penyuluhan Pertanian	5
3. Sistimatika	9
III. MEKANISME PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN LAPORAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	10
1. Penyusunan	10
2. Penjadwalan	12
3. Distribusi Program Penyuluhan Pertanian	12
4. Revisi	14
5. Laporan	14
IV. PEMBIAYAAN	15

POKOK-POKOK PEDOMAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN *)

I. PENGERTIAN

1. Pelaksanaan penyuluhan pertanian baik di daerah maupun di pusat harus mencerminkan prinsip satu kesatuan penyuluhan. Untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian harus dituangkan ke dalam satu perencanaan tertulis yang disusun setiap tahun dalam bentuk "Programa Penyuluhan Pertanian".
2. Programa Penyuluhan Pertanian disusun di berbagai tingkatan, yaitu tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian.
3. Programa Penyuluhan Pertanian yang disusun harus mencerminkan kepentingan program-program pemerintah dan aspirasi petani - nelayan beserta keluarganya dalam membangun pertanian.
4. Programa Penyuluhan Pertanian merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan petani - nelayan mengenai hal-hal yang akan di kerjakan di bidang penyuluhan pertanian sebagai upaya untuk mencapai tujuan program pembangunan pertanian.
5. Programa Penyuluhan Pertanian merupakan bagian dari program pembangunan pertanian. Sejalan dengan hal tersebut maka dalam programa penyuluhan pertanian harus dapat menggambarkan keterkaitan antara potensi wilayah, sasaran intensifikasi, sasaran produksi dengan tujuan sasaran penyuluhan pertanian.

II. NAMA, ISI DAN SISTIMATIKA PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Nama Programa Penyuluhan Pertanian.
 - a. Tingkat Nasional : Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Nasional.
 - b. Tingkat Propinsi : Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Propinsi.
 - c. Tingkat Kabupaten : Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten.
 - d. Tingkat WKBPP : Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat WKBPP.
2. Isi Programa Penyuluhan Pertanian.
 - a. Programa Penyuluhan Pertanian yang disusun di semua tingkatan yaitu tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten dan WKBPP pada hakekatnya meliputi upaya-upaya :

*) Akan disusun pedoman yang lebih terinci, setelah ada umpan balik dari daerah.

- Pengembangan dan pelestarian sumberdaya pertanian (manusia, alam, dan bantuan).
- Peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan teknologi (pra panen, panen, pasca panen, pemasaran dan rekayasa teknologi).
- Pemantapan Organisasi Usaha tani - nelayan dan kesejahteraan keluarga tani - nelayan.

b. Kegiatan Penyuluhan Pertanian yang dilancarkan pada masing-masing tingkatan sebagai berikut :

1). Tingkat Nasional/Pusat.

Berisi kegiatan yang mencakup penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, baik di tingkat Propinsi, Kabupaten maupun tingkat WKBPP.

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud yaitu :

- Upaya pembinaan dan bimbingan terhadap penerapan berbagai metode penyuluhan pertanian serta pengembangannya.
- Upaya perumusan/penetapan materi penyuluhan pertanian (meliputi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan sumber daya pertanian) serta upaya mentranspormasikannya kepada petani - nelayan.
- Upaya pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan, organisasi penyuluhan pertanian dan kelembagaan tani - nelayan.
- Upaya pengendalian penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan bimbingan pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi oleh daerah.
- Serta kegiatan lain yang akan dilancarkan di tingkat nasional karena masalah serta lingkupnya memerlukan penanganan tingkat nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti : Mimbar Sarasehan, Temu Wicara, Temu Usaha, Temu Tugas dan lain-lain.

2). Tingkat Propinsi.

Berisi kegiatan yang mencakup penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat WKBPP.

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud yaitu :

- Upaya pembinaan dan bimbingan dalam hal pemilihan dan pelaksanaan berbagai metode penyuluhan pertanian.
- Upaya perumusan atau penetapan materi penyuluhan pertanian (meliputi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan sumber daya pertanian) serta upaya mentranspormasikan-nya kepada petani - nelayan.
- Upaya pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan, organisasi penyuluhan pertanian dan kelembagaan tani - nelayan.
- Upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyuluhan pertanian melalui kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi serta bimbingan pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi oleh Kabupaten.
- Serta kegiatan lain yang akan dilancarkan di tingkat propinsi karena masalah serta lingkupnya memerlukan penanganan tingkat propinsi. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti : Mimbar Sarasehan, Temu Wicara, Temu Tugas dan lain-lain.

3). Tingkat Kabupatén.

Berisi kegiatan yang mencakup penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat WKBPP – WKBPP.

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud yaitu :

- Upaya bimbingan dalam hal pemilihan dan pelaksanaan berbagai metode penyuluhan pertanian.
- Upaya perumusan atau penetapan materi penyuluhan pertanian (meliputi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan sumber daya pertanian) serta upaya mentranspormasikan-nya kepada petani nelayan.
- Upaya pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan, organisasi penyuluhan pertanian dan kelembagaan tani - nelayan.
- Upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian melalui kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi serta bimbingan pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi Kabupaten ke BPP – BPP.

- Serta kegiatan lain yang akan dilancarkan ditingkat Kabupaten karena masalah serta lingkungannya memerlukan penanganan tingkat Kabupaten. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti : Mimbar Sarasehan, Temu Wicara, Temu Usaha dan lain-lain.

4). Tingkat WKBPP.

Berisi kegiatan yang mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat WKPP—WKPP.

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud yaitu :

- Upaya bimbingan dalam hal pemilihan dan pelaksanaan berbagai metode penyuluhan pertanian.
- Upaya bimbingan dalam hal perumusan atau penetapan materi penyuluhan pertanian (meliputi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan sumber daya pertanian) serta mentransformasikannya kepada petani-nelayan.
- Upaya menghiatkan sarana penyuluhan dan kemudahan-kemudahan bagi petani-nelayan dalam melakukan usaha tani-nelayannya.
- Upaya bimbingan, pengembangan dan pendayagunaan, organisasi penyuluhan pertanian dan kelembagaan tani-nelayan.
- Upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyuluhan pertanian di lapangan melalui kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.
- Serta kegiatan penyuluhan pertanian yang langsung dilancarkan di Tingkat WKBPP karena masalah serta lingkungannya memerlukan penanganan tingkat WKBPP.

Kegiatan-kegiatan tersebut seperti : Mimbar Sarasehan, Temu Wicara, Temu Usaha dan lain-lain.

Dari Program yang disusun di tingkat WKBPP selanjutnya disusun rencana kerja PPL Rencana kerja PPL yang disusun berisi rencana kegiatan pengajaran kepada petani-nelayan yang pada intinya meliputi :

- Materi apa/teknologi apa yang diajarkannya.
- Metode apa yang dipakai/bagaimana cara pengajarkannya.
- Kepada siapa materi tersebut diajarkan.
- Di mana dan kapan diajarkannya.
- Perlengkapan apa saja yang diperlukan (lihat contoh lampiran 4).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

CONTOH RENCANA ACARA KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT NASIONAL

No.	Kegiatan	Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterkaitan dengan pihak lain			Peserta/Sasaran	Keterangan
		Waktu	Lokasi		Pihak Lain	Macam/bentuk	(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	

LAMPIRAN 2

CONTOH RENCANA ACARA KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT PROPINSI & KABUPATEN

No.	Kegiatan	Tujuan Kegiatan (perubahan yang diinginkan dengan adanya kegiatan tsb.).	Pelaksanaan		Petugas/Penanggung Jawab	Instansi Terkait		Peserta/Sasaran (Kepada siapa kegiatan itu dilakukan)	
			Volume	Waktu		Instansi	Bentuk Ke- terkaitan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

LAMPIRAN 3.

CONTOH ACARA KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN DI WKBP

No.	Kegiatan	Tujuan	Masalah (alasan perlunya kegiatan itu dilaksanakan)	Materi yang akan diajarkan/diiktikan/arkan	Metoda (bagaimana mengajarkan/mengiktikan).	Sasaran (Siapa yang akan diberi pelajaran)	Pelaksanaan	
							Volume	Waktu

LAMPIRAN : 4

CONTOH RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN LAPANGAN (WKPP)

No.	Bulan Hari/Tanggal Jam	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Materi yang akan diajarkan/ diupayakan/di- mintakan	Cara/Metoda/ upaya yang ditempuh	Lokasi	Peralatan yang diper- lukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	April, 4, Selasa Jam	Latihan PPL	Upaya peme- cahan masalah di WKPP Anu	Diri Penyuluh	Tehnik mengawinkan ayam pelung	Demonstrasi dimana setiap peserta Lath- an harus men- coba sendiri	BPP	Sepasang a- yam peluang telah siap kawin
2.	5, Rabu Jam	Kunjungan kelompok tani	Kelompok da- pat menghitung /membuat ren- cana usaha tani	Kelompok Bumi Ayu	Tehnik pencä- tatan Usaha Tani Sederhana	Mengajukan sa- lah seorang kon- tak tani yang ahli membuat catatan Usaha Tani.	Pamoyang Desa Alur	Lembaran a- lat Peraga

LAMPIRAN 5.

CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 19.../19... (SEMESTER KE) *

No.	Kegiatan	Pelaksanaan						Hambatan/ Masalah	Saran/ Pemecahan Masalah	Sasaran/ Peserta	Keterangan
		Volume		Waktu		Lokasi					
		Ra	Re	Ra	Re	Ra	Re				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

KETERANGAN : *) Semester I : Bulan April s/d September
Semester II : Bulan Oktober s/d Maret
Ra / Re : Rencana / Realisasi

LAMPIRAN 6.

CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT PROPINSI TAHUN ANGGARAN 19.../19... (SEMESTER KE) *

No.	Kegiatan	Pelaksanaan						Hambatan/ Masalah	Saran/ Pemecahan Masalah	Sasaran/ Peserta	Keterangan
		Volume		Waktu		Lokasi					
		Ra	Re	Ra	Re	Ra	Re				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

KETERANGAN : *) Semester I : Bulan April s/d September
Semester II : Bulan Oktober s/d Maret
Ra / Re : Rencana / Realisasi

LAMPIRAN 7. **CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 19.../19... (SEMESTER KE) ***

No.	Kegiatan	Pelaksanaan						Keterangan			
		Volume		Waktu		Lokasi					
		Ra	Re	Ra	Re	Ra	Re				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

KETERANGAN : *) Triwulan I : Bulan April s/d Juni
 Triwulan II : Bulan Juli s/d September
 Triwulan III : Bulan Oktober s/d Desember

Triwulan IV : Bulan Januari s/d Maret
 Ra / Re : Rencana / Realisasi

LAMPIRAN : 8. **CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT WKBPP TAHUN ANGGARAN 19.../19... (TRIWULAN KE) ***

No.	Kegiatan	Pelaksana				Materi yang diajarkan	Metoda Mengajar	Sasaran/ Peserta	Hambatan /Masalah	Saran/ Pemecahan	Keterangan		
		Volume		Lokasi									
		Ra	Re	Ra	Re								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

KETERANGAN : *) Triwulan I : Bulan April s/d Juni
 Triwulan II : Bulan Juli s/d September

Triwulan III : Bulan Oktober s/d Desember
 Triwulan IV : Bulan Januari s/d Maret
 Ra / Re : Rencana / Realisasi

3. Sistematika.

Secara umum program penyuluhan pertanian memuat 3 (tiga) bagian pokok, dimana masing-masing bagian satu sama lain saling berkaitan.

Bagian pertama memuat gambaran tentang keadaan pertanian di suatu wilayah, bagian kedua memuat gambaran sasaran-sasaran/target-target produksi pertanian serta tujuan pembangunan pertanian di suatu wilayah, dan bagian ketiga memuat kegiatan penyuluhan pertanian sebagai salah satu upaya untuk tercapainya tujuan program pembangunan pertanian. Bagian pertama dan kedua umumnya tidak banyak mengalami perubahan dalam kurun waktu beberapa tahun sehingga penyusunannya dapat atau cukup 1 kali dalam 5 tahun.

Sedangkan bagian ketiga dibuat setiap tahun sekali.

Sistematika dari ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Bagian Pertama.

a. Gambaran umum wilayah kerja.

- 1). Letak geografi.
- 2). Pembagian wilayah administrasi.
- 3). Pembagian wilayah kerja penyuluhan pertanian.
- 4). Keadaan infrastruktur.
- 5). Keadaan kelembagaan.
- 6). Demografi/kependudukan dikaitkan dengan kebutuhan sektor pertanian seperti :

- usia kerja produktif.
- mata pencaharian.
- jenis kelamin
- tingkat pendidikan/ketrampilan/keahlian.
- dan lain-lain.

b. Gambaran umum potensi wilayah kerja.

- 1). Luas (sawah, tanah kering, kolam, tambak dan perairan umum).
- 2). Iklim (suhu, curah hujan, kelembaban dan lain-lain).
- 3). Jenis tanah.
- 4). Penggunaan lahan (luas/skala usaha, pola tanam/pola usaha, data-data produksi pertanian yang telah dicapai per tahun).

3.2. Bagian Kedua.

- a. Tujuan umum pembangunan pertanian di suatu wilayah.
- b. Sasaran-sasaran/target-target pembangunan pertanian yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ditinjau dari :
 - 1). Pencapaian produksi per satuan
 - 2). Luas lahan/tanam/jumlah/jenis/produksi/panen/skala usaha baik yang dilaksanakan melalui intensifikasi dalam program Bimas maupun non Bimas. Kesemuanya itu diperhitungkan berdasarkan kemampuan/perkiraan potensi yang dimiliki.
- c. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan program baik dilihat dari aspek teknis maupun non teknis.
- d. Tantangan-tantangan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

3.3. Bagian ketiga.

- a. Tujuan dan sasaran dilihat dari aspek penyuluhan pertanian.
- b. Permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan penyuluhan pertanian (dalam menggali ini dapat diidentifikasi faktor penentu/impact point).
- c. Upaya pemecahan masalah.
- d. Acara kegiatan penyuluhan pertanian (lampiran 1 - 4).

III. MEKANISME PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN LAPORAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN.

1. Penyusunan.

- a. Program Penyuluhan Pertanian disusun di berbagai tingkatan, yaitu tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP).
- b. KPPN, FKPP I, dan FKPP II merupakan wahana untuk menyerasikan dan menyelaraskan penyuluhan pertanian serta memadukan antara kepentingan Nasional, Daerah dan kepentingan Petani-Nelayan beserta keluarganya.

- c. Yang bertanggung jawab terhadap penyusunan program penyuluhan pertanian untuk :
- Tingkat Nasional adalah KPPN.
 - Tingkat Propinsi adalah FKPP I.
 - Tingkat Kabupaten adalah FKPP II.
 - Tingkat WKBPP adalah Penyuluh Pertanian Urusan Program Penyuluhan Pertanian.
- d. Koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan :
- Untuk tingkat Nasional oleh Ketua KPPN, yang dalam penyusunan dibantu oleh tim kerja KPPN dan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) di tingkat Nasional.
 - Untuk Tingkat Propinsi oleh Ketua FKPP I, yang dalam penyusunan dibantu oleh tim kerja FKPP I dan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) di tingkat Propinsi.
 - Untuk tingkat Kabupaten oleh Ketua FKPP II, yang dalam penyusunannya dibantu oleh tim kerja FKPP II dan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) di tingkat Kabupaten.
 - Untuk tingkat WKBPP oleh Kepala BPP, yang dalam penyusunannya dibantu oleh PPUP (Penyuluh Pertanian Urusan Program) dan Kelompok Penyuluh Pertanian di BPP.
- e. Tim kerja yang disebut dalam butir d dan PPUP bertugas menyiapkan, mengolah dan menyusun konsep program penyuluhan pertanian.
- f. Penyusunan konsep program secara umum dimulai dengan mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data/informasi tentang :
- Kebijakan dalam pembangunan pertanian antara lain menyangkut sasaran-sasaran produksi, perkreditan, harga, rekomendasi teknologi, penyaluran sarana produksi pertanian.
 - Potensi pertanian antara lain yang menyangkut lahan, iklim, manusia, kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat.
 - Usaha tani antara lain yang menyangkut rencana usaha tani, keinginan petani dalam upaya mengembangkan usaha tani, kebutuhan teknologi oleh petani-nelayan.

- Selanjutnya setelah diperoleh gambaran tersebut disusun konsep programa penyuluhan pertanian secara lengkap.
- g. Konsep yang telah disusun selanjutnya dibicarakan dalam rapat Tim Kerja (KPPN, FKPP I, FKPP II dan WKBPP) untuk dikoreksi dan disempurnakan, setelah konsep tersebut disetujui, kemudian disahkan oleh Komisi/Forum.
 - h. Dalam setiap pertemuan pembahasan konsep dan rapat pengesahan programa tersebut selalu mengundang KTNA untuk berperan serta secara aktif.

2. Penjadwalan.

- a. Programa Penyuluhan Pertanian sudah dapat disahkan bersamaan dengan awal tahun anggaran, baik dari APBN maupun APBD yaitu antara bulan April – Mei.
- b. Persiapan untuk penyusunan programa penyuluhan pertanian meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan pertemuan-pertemuan penyusunan.
 - b.1. Tingkat Nasional/selambat-lambatnya sudah selesai pada pertengahan bulan Desember bersamaan dengan masuknya usulan-usulan kegiatan dari daerah.
 - b.2. Tingkat Propinsi selambat-lambatnya sudah selesai pada pertengahan bulan Januari bersamaan dengan pembahasan-pembahasan DUP Daerah.
 - c.3. Tingkat Kabupaten selambat-lambatnya sudah selesai pada pertengahan bulan Februari bersamaan dengan pembahasan-pembahasan DUP Daerah.
 - d.4. Tingkat WKBPP selambat-lambatnya sudah selesai pada pertengahan bulan Maret bersamaan dengan turunnya rencana-rencana definitif intensifikasi dari Kabupaten.

3. Distribusi Programa Penyuluhan Pertanian.

- a. Untuk tingkat Nasional disampaikan kepada :
 - Menteri Pertanian RI.
 - Unit Eselon I lingkup Departemen Pertanian yang terkait erat dalam kegiatan penyuluhan pertanian untuk dipakai sebagai pegangan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

- Kantor Wilayah Departemen Pertanian untuk dipakai di tingkat propinsi sebagai acuan dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan penyuluhan pertanian.

b. Untuk tingkat Propinsi disampaikan kepada :

- Kepada Badan Diklat/luh Pertanian/selaku Ketua KPPN, Sekretaris BP. Bimas, Dirjen Pertanian Tanaman Pangan, Dirjen Perkebunan, Dirjen Peternakan, Dirjen Perikanan untuk dipakai sebagai acuan dalam melakukan pembinaan, bimbingan, supervisi dan monitoring dalam penyuluhan pertanian di daerah.
- Gubernur selaku Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi.
- Dinas-dinas lingkup pertanian tingkat I dan UPT Departemen Pertanian yang terkait dalam kegiatan penyuluhan pertanian, untuk dipakai sebagai pegangan dalam menyelenggarakan dan melakukan pembinaan penyuluhan pertanian di daerah.
- Kepala Dinas tingkat II/selaku Ketua FKPP II untuk dipakai di tingkat Kabupaten sebagai acuan dan sinkronisasi dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

c. Untuk tingkat Kabupaten disampaikan kepada :

- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian selaku Ketua FKPP I, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati I, Kepala Dinas Perkebunan Dati I, Kepala Dinas Peternakan Dati I, Kepala Dinas Perikanan Dati I dan Sekretaris Harian Bimas Propinsi untuk dipakai sebagai acuan bagi propinsi dalam melakukan pembinaan, bimbingan/supervisi dan monitoring kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten.
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten.
- Dinas-dinas lingkup pertanian untuk dipakai sebagai pegangan dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian.
- BPP-BPP untuk dipakai sebagai acuan dan sinkronisasi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di WKBPP.

d. Untuk tingkat WKBPP disampaikan kepada :

- Kepala Dinas Tingkat II/selaku Ketua FKPP II dan Kepala Dinas Dati II lingkup pertanian lainnya untuk dipakai sebagai acuan bagi Kabupaten

dalam melakukan bimbingan, supervisi dan monitoring kegiatan penyuluhan pertanian di BPP-BPP.

- Penyuluh Pertanian Lapangan di WKPP-WKPP untuk dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja.

4. Revisi.

Selama program dilaksanakan, perbaikan atau revisi bisa dilakukan apabila ternyata terdapat ketidakcocokan. Revisi ini harus dilakukan secara musyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan secara tertulis rumusan revisinya disampaikan kepada mereka.

5. Laporan.

Laporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian dari setiap tingkatan sebagai berikut :

- Untuk tingkat Nasional, laporan dibuat setiap semester paling lambat selesai pertengahan Nopember dan pertengahan Mei dan disampaikan kepada Menteri Pertanian RI.
- Untuk tingkat Propinsi, laporan dibuat setiap semester disampaikan ke Pusat dalam hal ini Kepala Badan DIKLATLUH Pertanian/Ketua KPPN paling lambat dapat diterima akhir Desember dan akhir April.
- Untuk tingkat Kabupaten, laporan dibuat setiap triwulan disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua FKPP I paling lambat dapat diterima masing-masing akhir Juli, Oktober, Januari dan April.
- Untuk tingkat WKBPP, laporan dibuat setiap triwulan disampaikan ke Ketua FKPP II paling lambat diterima masing-masing pertengahan Juli, Oktober, Desember dan Maret.

Contoh blanko laporan untuk setiap tingkatan terlihat pada lampiran 5, 6, 7 dan 8.

IV. PEMBIAYAAN

Pada dasarnya dana untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian disusun dalam program penyuluhan pertanian dapat bersumber dari APBN, APBD dan atau dana lainnya yang sah termasuk swadaya petani-nelayan.

ooo0ooo

PERPUSTAKAAN

PERPUSTAKAAN

BADAN PENCIHAIAN, LATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN



TIDAK DIPERDAGANGKAN



374
P